

**ANALISIS DAYA SAING USAHATANI KELAPA SAWIT DI
KABUPATEN MUKOMUKO (STUDI KASUS DESA BUMI MULYA)**

**ANALYSIS OF PALM OIL FARMING COMPETITIVENESS IN
MUKOMUKO DISTRICT (CASE STUDY VILLAGE BUMI MULYA)**

Aprizal, Putri Suci Asriani, dan Sriyoto
*Program Pascasarjana Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian
Universitas Bengkulu*

ABSTRACT

This study aimed to analyze the competitiveness of palm oil farming (competitive and comparative advantage), the impact of government policies on output and input oil palm cultivation, and the competitiveness of sensitivity to changes in oil palm farm output and input. Stratified Random Sampling method was used to select 86 respondents purposively. The reason for choosing of Mukomuko district is because this area has largest palm oil producers and largest palm oil planting area in the province of Bengkulu. The data used primary and secondary data. The Policy Analysis Matrix (PAM) method was used to analyze the data. The result shows that Bumi Mulya Village has competitive and comparative advantages. PP and SP have positive value of PCR (0,91), and DRCR (0,72). The impact of government policy on output are disincentive as shown by OT value negative Rp.5.521.890/Ha/year, value NPCO is 0,80. The impact of government policy subsidy to input is fertilizer. NT has negative value, EPC is 0,80, and SRP about 0,166. Government policy shows that the fertilizer is still needed on palm oil farming. The sensitivity analysis shows that the maximum limit that can be accepted to change the output when the input-output and prices drop below 3 percent, price increases of more than 100 percent of herbicides, inorganic fertilizer price increases below 55 percent, rising interest rates below 1 percent. Combination of sensitivity analysis shows that the fluctuation in input-output is very sensitive to oil palm farming in Bumi Mulya, Mukomuko district.

Keywords: *Palm oil, competitive and comparative advantage, governmental policies, and sensitivity.*

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan khususnya tanaman kelapa sawit merupakan salah satu primadona sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia, penyerap tenaga kerja, dan sumber pendapatan bagi petani. Kabupaten Mukomuko

merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di provinsi Bengkulu. Sumbangannya akan terus bertambah seiring dengan peningkatan areal penanaman dan membaiknya harga tandan buah segar (TBS). Dalam Pahan (2005) disampaikan bahwa bertambahnya luas areal penanaman memaksa petani untuk membuka lahan baru dan mengalihfungsikan lahan mereka ke tanaman kelapa sawit. Dengan latar belakang inilah, tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis daya saing usahatani kelapa sawit (keunggulan kompetitif dan komparatif), (2) Menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap output dan input pada usahatani kelapa sawit, (3) Menganalisis sensitivitas daya saing usahatani kelapa sawit terhadap perubahan output dan input.

METODE PENELITIAN

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (*purposive*). Metode penentuan responden menggunakan metode *Simple random sampling* dengan membagi sampel dalam tiga kelompok yaitu petani dengan tanaman belum menghasilkan (TBM), tanaman menghasilkan (TM), dan tanaman tidak menghasilkan/tua (TTM). Sampel yang digunakan berjumlah 86 petani responden. Penelitian ini menggunakan Matrik PAM (diadopsi dari Rachman, 2004^a; Rachman, 2004^b, dan Rusastra, 2004). Matrik PAM dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Policy Analysis Matrix (PAM)

Uraian	Penerimaan	Biaya Input		Keuntungan
		Tradable	Non tradable	
Harga Pasar	A	B	C	$D = A - B - C$
Harga Sosial	E	F	G	$H = E - F - G$
Divergensi	$I = A - E$	$J = B - F$	$K = C - G$	$L = I - J - K$

Sumber: Monke and Pearson (1989)

Keterangan:

- A = Penerimaan usahatani kelapa sawit pada harga privat
- B = Total biaya tradable usahatani kelapa sawit pada harga privat
- C = Total biaya non tradable usahatani kelapa sawit pada harga privat
- D = Tingkat keuntungan pada harga privat
- E = Penerimaan usahatani kelapa sawit pada harga sosial
- F = Total biaya tradable usahatani kelapa sawit pada harga sosial
- G = Total biaya non tradable usahatani kelapa sawit pada harga sosial
- H = Keuntungan sosial
- I = Output transfer
- J = Input Transper
- K = Faktor Transfer

L = Net Transfer

Baris pertama dari Matrik PAM adalah perhitungan dengan harga pasar (privat), yaitu harga yang betul-betul dibayarkan petani. Baris kedua merupakan penghitungan yang didasarkan pada harga sosial (shadow price), yaitu harga yang menggambarkan nilai sosial yang sesungguhnya bagi unsur biaya maupun hasil. Dan baris ketiga merupakan perbedaan perhitungan dari harga privat dengan harga sosial sebagai akibat dari dampak kebijaksanaan.

Pengkajian daya saing pada komoditas pertanian dengan menggunakan analisis PAM akan mempermudah analisis data, karena analisis ekonomi, finansial dan evaluasi dampak kebijakan pemerintah dilakukan secara simultan (Sadikin, 1999).

Analisis Keuntungan

- a. *Private Profitability (PP)*, yaitu $D = A - (B + C)$.

Keuntungan privat merupakan indikator daya saing (competitiveness). Apabila $D > 0$, berarti sistem komoditas tersebut memperoleh profit diatas normal. Hal ini mempunyai implikasi bahwa komoditas tersebut mampu ekspansi. Sebaliknya, bila Nilai $D \leq 0$, berarti sistem komoditas tersebut memperoleh profit di bawah normal dan belum mampu ekspansi.

- b. *Sosial Profitability (SP)*, yaitu $H = E - (F + G)$.

Keuntungan sosial merupakan indikator keuntungan komparatif (comparative advantage) atau efisiensi dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada divergensi dan penerapan kebijakan yang efisien, apabila $H > 0$. Sebaliknya, bila $H \leq 0$, berarti sistem komoditas tidak mampu bersaing tanpa bantuan atau intervensi pemerintah.

Efisiensi Finansial dan Efisiensi Ekonomi

- a. *Private Cost Rasio (PCR)* = $C / (A - B)$.

Apabila nilai PCR < 1 dan nilainya makin kecil, berarti sistem produksi usahatani kelapa sawit semakin kompetitif dan mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat dan kemampuannya tersebut akan meningkat. Sebaliknya bila, $PCR \geq 1$, sistem komoditas yang diteliti tidak memiliki keunggulan kompetitif.

- b. Domestic Resources Cost Ratio (DRCR) = $G / (E - F)$.

Jika $DRCR < 1$, maka sistem komoditas mempunyai keunggulan komparatif. Sebaliknya jika $DRCR \geq 1$, maka sistem komoditas tidak memiliki keunggulan komparatif.

Dampak Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Terhadap Output:

- a. Output Transfer (OT): $I = A - E$.

Jika nilai $OT > 0$, menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) kepada produsen, sebaliknya bila $OT \leq 0$, menunjukkan tidak ada transfer dari masyarakat (konsumen) kepada produsen.

- b. Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) = A / E .

Jika nilai $NPCO > 1$, maka semakin besar nilai NPCO, berarti semakin besar tingkat proteksi pemerintah terhadap output, sebaliknya bila $NPCO \leq 1$, kebijakan bersifat disinsentif.

Kebijakan Terhadap Input:

- a. Input Transfer (IT): $J = B - F$.

Jika nilai $IT > 0$, menunjukkan adanya transfer dari petani ke produsen pada input tradable, sebaliknya bila $IT \leq 0$, menunjukkan tidak adanya transfer dari petani ke produsen untuk input tradable.

- b. Nominal Protection Coefficient on Tradable Input (NPCI) = B / F

NPCI merupakan indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input domestik. Jika nilai $NPCI < 1$, berarti kebijakan bersifat protektif terhadap input, ada kebijakan subsidi terhadap input tradable, sebaliknya bila $NPCI \geq 1$, berarti tidak ada kebijakan protektif terhadap input atau tidak ada kebijakan subsidi terhadap input tradable.

- c. Transfer Factor (TF): $K = C - G$.

Transfer faktor merupakan nilai yang menunjukkan perbedaan harga privat dengan harga sosialnya yang diterima produsen untuk pembayaran faktor-faktor produksi yang tidak diperdagangkan (non tradable). Nilai $TF > 0$ berarti ada transfer dari petani kepada produsen input non tradable atau pemerintah, sebaliknya bila $TF \leq 0$ berarti tidak ada transfer dari petani kepada produsen input non tradable.

Kebijakan Terhadap Input-Output:

- a. Effective Protection Coefficient (EPC) = $(A - B) / (E - F)$.

EPC merupakan indikator yang menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan input tradable. Kebijakan masih bersifat protektif, jika nilai EPC > 1. Semakin besar nilai EPC berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditas domestik.

b. Net Transfer (NT): $L = D - H$.

Transfer bersih merupakan selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai $NT > 0$, menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output, demikian juga sebaliknya.

c. Profitability Coefficient (PC) = D / H .

Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Jika $PC > 0$, berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada konsumen, demikian juga sebaliknya.

d. Subsidy Ratio to Producer (SRP) = L / E .

Rasio subsidi produsen (SRP) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan. Nilai SRP yang negatif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbalan (opportunity cost) untuk memproduksi dan sebaliknya jika nilai SRP positif.

Analisis Sensitivitas dilakukan untuk melihat bagaimana hasil analisis suatu aktivitas ekonomi bila terjadi perubahan terhadap input dan output. Perubahan yang dimasukkan pada penelitian ini adalah perubahan harga output dan input.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Kelapa Sawit

Karakteristik petani kelapa sawit meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman usahatani, luas lahan, jarak lahan, pekerjaan, dan sumber pendapatan. Karakteristik petani kelapa sawit di sajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Karakteristik Petani Kelapa Sawit Desa Bumi Mulya Kecamatan Penarik

No	Uraian Karakteristik	Persentase	Rata-rata
1	Umur (tahun)		
	a. Muda (<35)	18,6	
	b. Sedang ($35 \leq X \leq 55$)	59,30	45
	c. Tua (> 55)	22,10	
2	Pendidikan (tahun)		
	a. Rendah (<9)	48,84	
	b. Sedang ($9 \leq X \leq 15$)	48,84	8
	c. Tinggi (> 15)	2,32	
3	Jumlah anggota keluarga (orang)		
	a. Sedikit (< 2)	12,79	
	b. Sedang ($2 \leq X \leq 4$)	83,72	2,43
	c. Banyak (> 4)	3,49	
4	Pengalaman Usahatani (tahun)		
	a. Sedikit (< 5)	1,16	
	b. Sedang ($5 < X < 15$)	65,12	12
	c. Banyak (> 15)	33,72	
5	Luas Lahan (hektar)		
	a. Sedikit (< 2)	17,44	
	b. Sedang ($2 \leq X \leq 4$)	70,93	2,8
	c. Banyak (> 4)	11,63	
6	Jarak Lahan (km)		
	a. Dekat (< 2)	29,07	
	b. Sedang ($2 \leq X \leq 4$)	67,44	2,26
	c. Jauh (> 4)	3,49	
7	Pekerjaan		
	a. Petani	82,56	
	b. PNS	2,32	Tani
	c. Lainnya (Taoke, buruh, warung)	15,12	
8	Sumber Pendapatan		
	a. Kelapa sawit	90,69	Kelapa sawit
	b. Luar kelapa sawit	9,31	

Sumber: Data Primer dianalisis, 2013

Tabel 2 menunjukkan bahwa umur petani rata-rata berada pada rentang usia produktif tahap pendewasaan, yaitu $35 \leq X \leq 55$ tahun sebesar 59,30

persen. Tingkat pendidikan, dengan rata-rata pendidikan formal tamat SD dan SMP masing-masing 48,84 persen, petani sudah berkemampuan mengadopsi berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai media pembelajaran yang dapat mereka akses, antara lain informasi dari penyedia sarana produksi, promosi dari pabrik pestisida, pabrik pupuk dan informasi dari sosial media lainnya.

Jumlah tanggungan keluarga yang relatif sedikit 2-4 orang, memberikan kesempatan petani untuk dapat mengalokasikan penghasilan mereka untuk kebutuhan usahatani kelapa sawit mereka seperti pemupukan, penyemprotan dan bidang kerja lainnya secara tepat.

Pengalaman berusahatani kelapa sawit rata-rata 12 tahun, dapat mencerminkan bahwa petani sudah berpengalaman dalam usahatani ini. Pengalaman yang lama ini sedikit banyak telah membuka wawasan petani tentang bagaimana budidaya usahatani kelapa sawit yang baik. Hal ini dibuktikan dengan telah berlangsungnya penebangan kelapa sawit yang tidak baik bibitnya dengan penanaman baru dengan bibit yang bersertifikat. Sementara dengan luas lahan garapan usahatani kelapa sawit petani rata-rata 2,8 hektar, mengharuskan petani untuk lebih intensif dalam mengelola usahatani. Dengan luas lahan garapan yang sedang ini banyak aktivitas pekerjaan dilakukan oleh pemilik lahan, mulai dari pemupukan, penyemprotan, dan kadang-kadang pemanenan dan penunasan/pruningan.

Jarak lahan usahatani dari rumah ke kebun rata-rata 2,26 km, dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda motor hanya dalam waktu maksimal 30 menit, menyebabkan petani lebih banyak menghabiskan waktunya di lahan usahatani. Pekerjaan yang rata-rata sebagai petani, menyebabkan mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di kebun, karena mereka berprinsip di kebun pasti ada hal yang bisa dikerjakan dibanding berada di rumah.

Pendapatan petani yang sebagian besar atau 90,69 persen berasal dari kelapa sawit, menyebabkan petani menaruh harapan besar terhadap usahatani yang mereka kelola. Kelapa sawit yang merupakan tanaman perkebunan tetap mengalami *siklus track* (kurang buah). Dalam situasi ini petani sangat terbebani dan mulai bingung untuk memenuhi kebutuhannya.

Analisis Daya Saing Usahatani Kelapa sawit Desa Bumi Mulya

Hasil analisis dengan metode *Policy Analysis Matrix* (PAM) menunjukkan bahwa nilai PP (keuntungan privat) untuk usahatani kelapa sawit di Desa Bumi Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko adalah Rp 1.799.812,00/Ha/tahun. Ini menunjukkan bahwa masih menguntungkan dan memiliki keuntungan kompetitif (Benusu, 2008).

Nilai PCR (rasio biaya privat) untuk usahatani kelapa sawit mendekati 1 yaitu sebesar 0,91, artinya usahatani kelapa sawit masih bisa diusahakan. Untuk menghasilkan satu unit nilai tambah memerlukan biaya domestik yang

lebih kecil dari satu unit, dengan kata lain bahwa Desa Bumi Mulya masih memiliki kemampuan secara ekonomi dalam membiayai dan memproduksi kelapa sawit secara efisien dan secara finansial kelapa sawit yang dihasilkan dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Matrik Analisis Kebijakan Usahatani Kelapa Sawit Desa Bumi Mulya

Uraian	Penerimaan	Biaya Input		Keuntungan
		Tradable	Non Tradable	
Harga Privat	22,849,200	3,074,788	17,974,600	1,799,812
Harga Sosial	28,371,090	4,715,620	17,051,190	6,604,280
Dampak Kebijakan	(5,521,890)	(1,640,832)	923,410	(4,804,468)
Hasil Analisis Matriks				
PP	= A - (B + C)	=		1,799,812
SP	= E - (F + G)	=		6,604,280
PCR	= C / (A - B)	=		0.9090
DRCR	= G / (E - F)	=		0.7208
OT	= A - E	=		(5,521,890)
NPCO	= A / E	=		0,8054
IT	= B - F	=		(1,640,832)
NPCI	= B / F	=		0.6520
TF	= C - G	=		923,410
EPC	= (A - B) / (E - F)	=		0,8359
NT	= D - H	=		(4,804,468)
PC	= D / H	=		0,2725
SRP	= L / E	=		0.1693

Hasil analisis dengan metode PAM menunjukkan bahwa nilai SP (keuntungan sosial) untuk usahatani kelapa sawit adalah Rp 6.604.280,00/Ha/tahun. Ini menunjukkan bahwa masih layak diusahakan dan memiliki keuntungan komparatif (Benusu, 2008). Sedangkan nilai DRRCR (ratio sumber daya domestik) usahatani kelapa sawit di Desa Bumi Mulya adalah 0,72. Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan 1 unit nilai tambah diperlukan biaya domestik sebesar 0,72 unit pada usahatani kelapa sawit. Dalam kaitan perdagangan internasional maka nilai rasio DRRCR usahatani kelapa sawit sebesar 0,72. Semakin rendah nilai koefisien DRRCR berarti Desa Bumi Mulya mampu bertahan walaupun tanpa bantuan pemerintah karena memiliki sumber daya domestik yang diperlukan bagi pengembangan komoditas kelapa sawit.

Berdasarkan hasil analisis PCR dan DRCCR pada usahatani kelapa sawit menunjukkan bahwa nilai PCR < 1 dan DRCCR < 1 , dengan demikian usahatani kelapa sawit di Desa Bumi Mulya masih memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.

Walaupun memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, tetapi dengan tingkat keuntungan yang sangat kecil dikhawatirkan petani tidak akan mampu bertahan dalam mengelola usahatani kelapa sawitnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (1) tingkat produktivitas kelapa sawit di Desa Bumi Mulya yang masih rendah, bila dibandingkan dengan produktivitas perkebunan besar swasta bisa mencapai 35.000 kg/Ha/tahun (Agrina, 2011), dan (2) Rendahnya harga TBS yang diterima petani, karena petani di daerah penelitian tidak memiliki posisi tawar dalam menentukan harga TBS.

Dampak Kebijakan Pemerintah

Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Output

Indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap output dapat dilihat dengan menggunakan nilai OT (*Transfer Output*) dan NPCO (*Nominal Protection Coefficient on Output*). Hasil analisis dengan metode PAM diketahui bahwa nilai OT pada usahatani kelapa sawit adalah 0, artinya tidak adanya intervensi pemerintah dalam penentuan harga TBS, dimana mekanisme harga TBS diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Besarnya nilai koefisien *nominal protection coefficient on output* (NPCO) pada usahatani kelapa sawit 0,8, artinya kebijakan pemerintah bersifat disinsentif.

Dampak Kebijakan Terhadap Input

Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat intervensi pemerintah terhadap input produksi adalah nilai Transfer Input (TI), Transfer Faktor (TF) dan Koefisien Proteksi Nominal pada Input (NPCI). Hasil analisis dengan metode PAM diketahui bahwa nilai TI adalah negatif Rp 1.640.832,00/Ha/tahun. Nilai Transfer Input (TI) menggambarkan kebijakan (subsidi atau pajak) yang terjadi pada input produksi tradable. Nilai TI yang bernilai negatif untuk usahatani kelapa sawit menunjukkan bahwa terdapat kebijakan subsidi terhadap input produksi *tradable* (pupuk anorganik) dalam perusahaan usahatani kelapa sawit. Hal tersebut menguntungkan bagi produsen TBS, karena terdapat kebijakan pemerintah berupa subsidi atas input *tradable* (pupuk anorganik) yang menyebabkan harga yang dibayarkan oleh petani terhadap input tersebut lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya.

Koefisien proteksi input nominal (NPCI) merupakan rasio antara biaya input *tradable* berdasarkan harga sosial dengan harga finansial. Nilai NPCI menunjukkan seberapa besar insentif yang diberikan pemerintah terhadap

input produksi *tradable*. Dampak kebijakan subsidi input (terutama pupuk) yang dilakukan pemerintah dapat dilihat nilai NPCI. Hasil analisis dengan Metode PAM menunjukkan bahwa Nilai NPCI pada usahatani kelapa sawit adalah 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan input yang diterapkan pemerintah memberikan insentif bagi petani kelapa sawit berupa harga input yang dibayar petani hanya 65 persen dari harga input seharusnya (petani mendapat subsidi pemerintah), yang tercermin dari koefisien NPCI sebesar 0,65.

Selain menggunakan input *tradable*, produsen kelapa sawit juga menggunakan input *non tradable* (domestik) seperti tenaga kerja, bibit, peralatan, lahan, dan input domestik lainnya. Nilai Transfer Faktor (TF) mampu menggambarkan intervensi pemerintah terhadap input *non tradable*. Hasil Analisis dengan menggunakan metode PAM diketahui bahwa nilai TF Rp 923.410,00/Ha/tahun. Nilai Transfer Faktor yang bernilai positif tersebut menggambarkan bahwa harga input *non tradable* yang dikeluarkan pada harga finansial lebih tinggi dibandingkan dengan input *non tradable* pada harga sosial. Pada pengusahaan usahatani kelapa sawit, produsen harus membayar input *non tradable* lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan, mereka mengalami kerugian sebesar Rp 923.410,00/Ha/tahun.

Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Input-Output

Koefisien Proteksi Efektif (EPC), Transfer Bersih (NT), Koefisien Keuntungan (PC) dan Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP) merupakan nilai-nilai yang menjadi indikator dari dampak kebijakan input-output (Tarsono, 2006). Didalam alat analisis PAM, indikator yang mampu menjelaskan pengaruh dampak kebijakan terhadap surplus produsen adalah nilai Transfer Bersih (NT). Nilai Transfer Bersih merupakan selisih dari nilai keuntungan privat dengan nilai keuntungan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Transfer Bersih pada pengusahaan kelapa sawit bernilai negatif Rp 4.804.468,00/Ha/tahun. Nilai NT tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menyebabkan petani dirugikan sebesar nilai NT.

Nilai EPC menggambarkan sejauh mana kebijakan pemerintah bersifat melindungi produksi domestik secara efektif. Jika nilai EPC kurang dari satu, maka kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif atau menghambat produsen untuk memproduksi. Pada pengusahaan kelapa sawit Nilai EPC untuk kelapa sawit 0,83, artinya kebijakan pemerintah secara simultan tidak memberi proteksi kepada produksi dalam negeri.

Indikator dampak kebijakan terhadap input-output selanjutnya adalah SRP atau Rasio Subsidi bagi Produsen. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai SRP pada usahatani kelapa sawit adalah 0,16. Artinya secara umum kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang menguntungkan bagi produsen (petani kelapa sawit), karena petani kelapa

sawit menerima subsidi (petani kelapa sawit membayar biaya produksi lebih murah dari *oppurtunity cost* berproduksi dengan kata lain kebijakan pemerintah meningkatkan keuntungan yang diterima petani sebesar 16 persen. Nilai PC 0,27 artinya kebijakan pemerintah secara simultan menyebabkan keuntungan yang diterima oleh petani lebih kecil tanpa adanya kebijakan pemerintah.

Analisis Sensitivitas Terhadap Daya Saing Usahatani Kelapa Sawit

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan usahatani kelapa sawit sedikit banyak akan berpengaruh pada daya saing komoditi kelapa sawit tersebut. Keterbatasan Matriks Analisis Kebijakan (PAM) yaitu analisis yang dilakukan bersifat statis (hanya berlaku pada musim bersangkutan). Untuk menutupi keterbatasan tersebut maka dilakukanlah analisis sensitivitas (Kadariah, 1976). Dalam penelitian ini analisis sensitivitas dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Analisis sensitivitas cara pertama dilakukan mengetahui daya saing kedua output yang dianalisis berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di lokasi penelitian. Sedangkan analisis sensitivitas cara kedua dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel apakah yang paling berpengaruh pada daya saing usahatani kelapa sawit.

Analisis Sensitivitas Jika Terjadi Penurunan Jumlah Output

Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa setelah terjadi penurunan output hingga 3 persen, menyebabkan daya saing kelapa sawit melemah. Hal tersebut terlihat dari nilai PCR dan DRCR setelah perubahan yang lebih besar dari nilai PCR dan DRCR sebelum terjadi perubahan. Penurunan jumlah output hingga 3 persen menyebabkan keunggulan kompetitif dan komparatif kelapa sawit melemah mendekati angka 1, tercermin dari nilai PCR dan DRCR setelah perubahan masing-masing 0,94 dan 0,76. Sedangkan nilai PP dan SP juga mengalami penurunan setelah terjadi perubahan, masing-masing menjadi Rp 1.114.336,00/Ha/tahun dan Rp 5.415368,00/Ha/tahun.

Analisis Sensitivitas Jika Penurunan Harga Output

Hasil analisis sensitivitas jika terjadi penurunan harga output sebesar 3 persen menyebabkan keuntungan privat (PP) dari perusahaan kelapa sawit menjadi berkurang. Nilai PP kelapa sawit setelah terjadi perubahan adalah Rp 1.114.336,00/Ha/tahun. Selain itu keunggulan kompetitif perusahaan kelapa sawit melemah tercermin dari nilai PCR yang mendekati angka 1 yaitu 0,94.

Senada dengan daya saing kompetitif kelapa sawit, menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit mengalami pengurangan keuntungan setelah terjadi penurunan harga output sebesar 3 persen menjadi Rp 5.753.137,00/Ha/tahun.

Dari sisi lain, keunggulan komparatifnya komoditas kelapa sawit pun melemah ditunjukkan dengan nilai DRCCR setelah perubahan menjadi 0,75.

Analisis Sensitivitas Jika Terjadi Kenaikan Harga Herbisida

Hasil analisis menunjukkan kenaikan harga input herbisida sampai 100 persen tidak menyebabkan nilai Keuntungan Privat dan Keuntungan Sosial pada perusahaan komoditas kelapa sawit bernilai negatif. Ini berarti walaupun terjadi kenaikan harga herbisida hingga mencapai 100 persen komoditas kelapa sawit tersebut masih layak untuk diusahakan baik secara finansial atau ekonomi. Ini terbukti dari nilai PCR dan DRCCR setelah perubahan yang bernilai kurang dari satu yaitu masing-masing 0,95 dan 0,74.

Analisis Sensitivitas Jika Harga Input Pupuk Anorganik Naik

Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa dengan kenaikan harga input pupuk anorganik sebesar 55 persen menyebabkan terjadinya penurunan nilai PP menjadi Rp 425.959,00/Ha/tahun dan semakin melemahnya nilai PCR yang mendekati angka 1 yaitu 0,98. Senada dengan itu dengan kenaikan harga input pupuk anorganik sebesar 55 persen menyebabkan sensitivitas nilai dari SP juga melemah menjadi Rp 4.264.499,00/ Ha/tahun dan semakin melamahnya daya saing komparatif kelapa sawit yang ditunjukkan dengan nilai DRCCR yang mendekati angka 1 yaitu 0,8.

Analisis Sensitivitas Jika Terjadi Kenaikan Suku Bunga

Hasil analisis dengan matrik PAM didapatkan bahwa dengan kenaikan suku bunga hanya sebesar 1 persen membuat keuntungan privat (PP) berkurang menjadi Rp 425.959,00/Ha/tahun, dan nilai PCR melemah menjadi 0,98, artinya daya saing kompetitif usahatani kelapa sawit di Desa Bumi Mulya melemah. Sedangkan keuntungan sosial (SP) bernilai negatif dan usahatani kelapa sawit menjadi tidak berdaya saing yang ditunjukkan dengan nilai DRCCR lebih dari satu yaitu 1,11.

Analisis Sensitivitas Gabungan

Analisis sensitivitas gabungan untuk melihat sejauh mana komoditas kelapa sawit dapat terus bertahan bila terjadi perubahan input-output secara bersama-sama. Setelah dilakukan analisis sensitivitas secara bersama-sama diketahui bahwa usahatani kelapa sawit di Desa Bumi Mulya menjadi tidak layak diusahakan karena keuntungan yang diperoleh baik privat maupun sosial menjadi negatif, dan kehilangan daya saingnya baik kompetitif maupun komperatifnya. Nilai PP dan PCR masing-masing adalah 1,09 dan 0,89.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis dengan metoda *Policy Analysis Matrix* (PAM) menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit di Desa Bumi Mulya memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif, ditunjukkan dengan PP dan SP yang bernilai positif, dan nilai PCR dan DRCR yang kurang dari 1.
2. Kebijakan pemerintah bersifat disinsentif pada kebijakan pemerintah pada output. Sedangkan pada kebijakan pemerintah pada input menunjukkan adanya kebijakan subsidi.
3. Hasil analisis sensitivitas secara parsial menyebabkan usahatani kelapa sawit masih memiliki keunggulan kompatitif dan komparatif, dan masih layak untuk diusahakan. Setelah dilakukan uji sensitivitas secara simultan menunjukkan bahwa usahatani kelapa sawit di Desa Bumi Mulya menjadi tidak layak diusahakan lagi, menyebabkan tidak memiliki keunggulan kompetitif lagi, dan keunggulan kompetitifnya semakin lemah.

Saran

1. Meskipun secara finansial maupun ekonomi menguntungkan, usahatani kelapa sawit memberikan keuntungan yang tidak begitu besar karena produksi yang dihasilkan masih rendah. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko dapat memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan (subsidi) bibit yang bersertifikat, sehingga produktivitas kelapa sawit petani rakyat dapat ditingkatkan, selain itu peran serta penyuluh pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit dapat dioptimalkan dalam menuju produktivitas kelapa sawit yang meningkat.
2. Dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, maka usahatani kelapa sawit di Desa Bumi Mulya Kecamatan Penarik perlu lebih diarahkan pada peningkatan efisiensi usaha yang disertai dengan peningkatan produktivitas dan pemanfaatan hasil. Untuk itu diperlukan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan cara penyediaan fasilitas kredit usaha agar petani tidak menggantungkan modalnya dari hasil panen. Serta adanya pelayanan teknis seperti standarisasi produk dan informasi pasar dan

mendorong pengembangan kemitraan usaha antara petani dengan industri pengolahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrina. 2011. 3526 *Sangat-Sangat Memungkinkan*. Tabloid Agrobisnis Dwi Mingguan. Diunduh tanggal 13 Maret 2013.
- Benusu. 2008. *Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Perkebunan Jambu Mete Rakyat di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Selami IPS 25(1):1-14
- Kadariah, et al. 1976. *Pengantar Evaluasi Proyek Jilid 1*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Monke, E.A., and E.S. Pearson. 1989. *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. Cornell University Press. London.
- Pahan, I., dan Tjahjanto, R.D. 2005. *Pola Peremajaan Areal Plasma dari Segi Pembinaan Petani, Ketersediaan Modal dan Mengatasi Kesenjangan Pendapatan*. Makalah tidak diterbitkan.
- Rachman, Benny, Pantjar Simatupang, dan Tahlim Sudaryanto. 2004^a. Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Padi. *Prosiding Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah*. Litbangtan RI. Bogor.
- Rachman, Handewi PS., Supriyati, Saptana, dan Benny Rachman. 2004^b. Efisiensi dan Daya Saing Usahatani Hortikultura. *Prosiding Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah*. Litbangtan RI. Bogor.
- Rusastra, I Wayan., Benny Rachman, dan Supena Friyanto. 2004. Analisis Daya Saing dan Struktur Proteksi Komoditas Palawija. *Prosiding Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Pertanian di Lahan Sawah*. Litbangtan RI. Bogor.
- Sadikin, Ikin. 1999. Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan Pemerintah pada Pengembangan Produksi Jagung di Bengkulu. *Makalah SemNas "Strategi Pengembangan Agribisnis Menuju Indonesia Baru"*: Faperta Universitas Nasional. Jakarta.
- Tarsono. 2006. *Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Gula (Kasus di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat)*. Skripsi. Ekonomi dan Sumberdaya. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.